

**ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

**OLEH :
ANDRYNY LESTARI SIREGAR
178330144**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)13/12/21

**ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

**OLEH:
ANDRYNY LESTARI SIREGAR
178330144**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)13/12/21

**ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Medan Area



**OLEH:
ANDRYNY LESTARI SIREGAR
178330144**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)13/12/21

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan
Nama : **ANDRYNY LESTARI SIREGAR**
NPM : 17.833.0144
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing



(Dra. Hj. Retnawati Siregar, M.Si)

Pembimbing

Mengetahui :




Dr. Hasan Effendi, M.Si
Dekan


(Sari Nuzullina Rahmadhani, SE., Ak., M.Acc)
Ka. Prodi Akuntansi

12/1021

Tanggal/Bulan/Tahun Lulus : 27/Juli/2021

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “**Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan**”,

Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi percabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berbeda, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skrip ini

Medan, 27 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan



Andryny Lestari Siregar

NPM. 17.833.0144

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Andryny Lestari Siregar

NPM : 178330144

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan**". Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 27 Juli 2021

Yang Menyatakan



Andryny Lestari Siregar

NPM. 17.833.0144

RIWAYAT HIDUP

Peneliti dilahirkan di Kota Padangsidimpuan pada tanggal 30 Oktober 1998 dari Ayah H. Sahrizal Siregar dan Ibu Hj. Hotnida Wati Daulay. Peneliti merupakan putri ke-4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara. Pada tahun 2017 peneliti lulus dari SMA Negeri 1 Padangsidimpuan dan pada tahun 2017 terdaftar sebagai Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Padangsidimpuan tahun 2016-2019 dilihat dari: (1) Rasio efektivitas, (2) Rasio efisiensi, (3) Rasio Keserasian, (4) Rasio Pertumbuhan, dan (5) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini seluruh laporan keuangan pemerintah daerah Kota Padangsidimpuan. Sampel penelitian ini laporan keuangan Pemerintah Kota Padangsidimpuan tahun 2016-2017. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, sedangkan sumber data menggunakan data sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan dilihat dari (1) Rasio Efektivitas dapat dikategorikan kurang efektif, karena rata-rata efektivitasnya 88,86% (2) Rasio Efisiensi PAD tergolong efisien karena rata-rata besarnya rasio ini sebesar 96,44% (3) Rasio Keserasian dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Padangsidimpuan mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk belanja operasi daerah yaitu rata-rata sebesar 81,6% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 18,33%, (4) Rasio Pertumbuhan selalu mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun (5) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong rendah dan dalam kategori pola hubungan Instruktif karena rata-rata rasionya sebesar 11,82%.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the Padangsidempuan City Government's financial performance from 2016 to 2019 using the following metrics: (1) Effectiveness Ratio, (2) Efficiency Ratio, (3) Harmony Ratio, (4) Growth Ratio, and (5) Regional Financial Independence Ratio.

This study is a type of descriptive research. The population in this study were all financial reports of the Padangsidempuan city government. The sampel of this research was the financial statements of the Padangsidempuan city government for 2016-2019. The type of data in this research is quantitativ data, while the data source uses secondary data. The data analysis technique in this research is quantitative descriptive.

The results of the study indicate that the financial performance of the Padangsidempuan City Government as seen from (1) the Effectiveness Ratio can be categorized as ineffective, because the average effectiveness is 88.86% (2) The PAD Efficiency Ratio is classified as efficient because the average size of this ratio is 96.44 % (3) The Harmony Ratio can be said that the Padangsidempuan City Government allocates most of its budget for regional operating expenditures, which is an average of 81.6% compared to the average capital expenditure of 18.33%, (4) Growth Ratio always experiences growth from year to year (5) the ratio of Regional Financial Independence is still very low and in the category of Instructive relationship pattern because the average ratio is 11.82%.

Keywords: *Regional Financial Performance, PAD Effectiveness Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio, Harmony Ratio, Growth Ratio, and Regional Financial Independence Ratio.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan**". Adapun penyusunan skripsi ini, penulis menyusun dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat terselesaikannya proposal ini tepat waktu. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orangtua penulis yang tercinta Ibunda Hj. Hotnida Wati Dauly dan H. Sahrizal Siregar yang telah telah memberikan cinta dan kasihnya setiap hari dan telah banyak memberikan semangat serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Msc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Ihsan Effendi, SE, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Medan Area.
4. Ibu Sari Nuzullina Rahmadhani, SE, Ak, M.Acc, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
5. Ibu Dra. Hj. Rernawati Siregar, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Habibie SE.,M.Ak, selaku Dosen Sekretaris yang juga telah bersedia untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini .

7. Bapak Drs. Ali Usman Siregar, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan arahan serta kritik guna membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Kepada Kakak-kakak tercinta Yana Fitriah Siregar dan Ellysna Putri Siregar yang sudah banyak memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.
9. Semua sahabat dan teman penulis Risda, Piak, Jeje, Kannya, Lastri, Susi dan teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan banyak dukungan dan semangat.
10. Kepada Candra Aditama Nasution yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, memberikan semangat serta dukungan dan saran.
11. Bapak Henri Afandi, S.E, M.M yang telah banyak memberikan masukan dan membantu penulis pada saat penelitian di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkannya. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.

Medan, 27 Juli 2021

Penulis

Andryny Lestari Siregar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
RIWAYAT HIDUP	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Analisis Rasio Keuangan	6
2.2 Penilaian Kinerja Keuangan	11
2.3 Kinerja Keuangan Daerah	15
2.4 Penelitian Terdahulu	17
2.5 Kerangka Konseptual	18
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	21
3.3.1 Jenis Penelitian	21
3.3.2 Lokasi Penelitian	21
3.3.3 Waktu Penelitian	21
3.2 Populasi dan Sampel	22

3.2.1 Populasi	22
3.2.2 Sampel	22
3.3 Variabel Penelitian	22
3.4 Jenis dan Sumber Data	25
3.5 Teknik dan Pengumpulan Data	25
3.5 Teknik Analisis Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1 Data Umum	28
4.1.1 Gambaran Umum Kota Padangsidempuan	28
4.1.2 Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Padangsidempuan	29
4.2 Data Khusus	32
4.3 Analisis Data	34
4.4 Pembahasan	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	64

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Pengukuran Keuangan	2
Tabel 2. 1 Kriteria Pengukuran Efektivitas	8
Tabel 2. 2 Kriteria Pengukuran Efisiensi	8
Tabel 2. 3 Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah	11
Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4. 1 APBD Kota Padangsidimpuan Tahun 2016-2019	32
Tabel 4. 2 Realisasi APBD Kota Padangsidimpuan Tahun 2016-2017	33
Tabel 4. 3 Rasio Efektivitas PAD	36
Tabel 4. 4 Rasio Efisiensi PAD	39
Tabel 4. 5 Rasio Belanja Operasi	42
Tabel 4. 6 Rasio Belanja Modal	44
Tabel 4. 7 Rasio Pertumbuhan	47
Tabel 4. 8 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	49

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	20
Gambar 2. 2 Peta Kota Padangsidempuan.....	29
Gambar 3. 1 Rasio efektivitas PAD Pemerintah Kota Padangsidempuan.....	36
Gambar 3. 2 Rasio Efisiensi PAD Kota Padangsidempuan	40
Gambar 3. 3 Rasio Belanja Operasi Kota Padangsidempuan	43
Gambar 3. 4 Rasio Belanja Modal Kota Padangsidempuan.....	45
Gambar 3. 5 Rasio Pertumbuhan Kota Padangsidempuan	47
Gambar 3. 6 Rasio Kemandirian Kota Padangsidempuan.....	50



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Laporan Keuangan Kota Padangsidempuan Tahun 2016-2019.....	64
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	71
Lampiran 3 Surat Balasan Izin Penelitian.....	72
Lampiran 4 Surat Telah Selesai Melakukan Penelitian	73



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan serta pertanggung jawaban keuangan daerah bersumber pada peraturan pemerintah Pasal 4 Nomor 105 Tahun 2000 yang menegaskan kalau pengelolaan keuangan daerah harus dicoba secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab serta dengan mencermati asas keadilan serta kepatuhan. Apabila pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan baik yang cocok dengan peraturan yang sudah diresmikan, hingga pastinya hendak tingkatkan kinerja pemerintahan itu sendiri.

Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi perihal yang berarti untuk pemerintah daerah serta pihak eksternal. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu metode untuk mengukur serta memastikan keahlian daerah dalam melakukan serta melaksanakan ketentuan penerapan keuangan secara baik seta benar untuk mempertahankan layanan daerah yang di idamkan, yang dimana dalam evaluasi yang lebih besar menjadi tuntutan yang wajib dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan buat melakukan investasi di dalam wilayah tersebut. Pengukuran informasi kinerja keuangan yang bersumber dari data finansial yang sudah diukur bersumber pada anggaran yang sudah dibuat yang bisa jadi peningkatan program selanjutnya demi menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik serta bermutu.

Untuk mewujudkan keahlian suatu daerah, pemerintah diharapkan sanggup ataupun mandiri di dalam pembiayaan aktivitas pemerintah daerah dengan tingkatan ketergantungan yang presentasenya lebih kecil kepada Pemerintah Pusat sehingga Pendapatan Asli Daerah wajib jadi bagian yang terbanyak dalam memobilisasi dana penyelenggaraan Pemda.

Pemerintah daerah bagaikan pihak yang diberikan tugas melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas laporan keuangan daerahnya buat dinilai apakah daerah tersebut sukses melaksanakan tugasnya dengan baik ataupun tidak. Salah satu peralatan buat menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap kinerja keuangan daerah yang sudah di tetapkan serta dilaksanakannya.

Untuk memperhitungkan ataupun menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, ialah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang antara lain Rasio efektivitas PAD, Rasio Efisiensi PAD, Rasio Keserasian, Rasio pertumbuhan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Halim, 2012:L-2).

Tabel 1. 1
Pengukuran Keuangan
Pemerintah Kota Padangsidimpuan

Tahun	Rasio Efektivitas	Rasio Efisiensi	Rasio Keserasian Modal	Rasio Pertumbuhan	Rasio Kemandirian
2016	92,79%	104,6%	18,65%	-	10,69%
2017	91,05%	92,25%	23,14%	5,5%	14,82%
2018	82,35%	97,04%	14,40%	6, 2%	10,60%
2019	89,26%	91,33%	17,16%	9,4%	11,33%

Sumber: Data diolah (2020)

Dapat dilihat dari tabel diatas untuk rasio efektivitas untuk tahun 2016 samapai tahun 2019 rasio efektivitas mengalami penurunan, penurunan terendah terjadi pada tahun 2018 dan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2016, Sedangkan rasio efisiensi tahun 2016 sampai dengan

tahun 2019 penurunan. Untuk rasio keserasian modal mengalami penurunan, kenaikan terbesar tahun 2017. Dan rasio pertumbuhan mengalami kenaikan dan untuk rasio kemandirian mengalami kenaikan, kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu 14,82%.

Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan keahlian ataupun kemampuan daerah tersebut yang terus jadi lebih baik. Dan semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah tersebut menjadi semakin baik (Halim, 2012:L-6).

Menurut Halim (2012:L-8) rasio keserasian, semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja teratur berarti persentase belanja investasi maupun belanja pembangunan yang digunakan dalam fasilitas prasarana ekonomi masyarakat cenderung terus menjadi kecil. Untuk rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar keahlian pemerintah daerah untuk mempertahankan serta tingkatkan keberhasilannya yang sudah dicapai dalam periode ke periode berikutnya.

Semakin besar rasio kemandirian, mempunyai arti kalau tingkatan ketergantungan daerah terhadap dorongan pihak eksternal terus menjadi rendah.

Menurut Mardiasmo (20013:121) pengukuran kinerja sangat berarti untuk memperhitungkan akuntabilitas organisasi serta manajer dalam pelayanan publik yang lebih banyak, yaitu bukan hanya keahlian menunjukkan bahwa uang publik tersebut sudah dbelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menampilkan bahwa uang publik tersebut sudah dibelanjakan secara efektif serta efisien.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul "**Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kajian latar belakang masalah diatas, maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Padangsidempuan jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Padangsidempuan jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Padangsidempuan jika dilihat dari Rasio Keserasian?
4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Padangsidempuan jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan
5. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Padangsidempuan jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

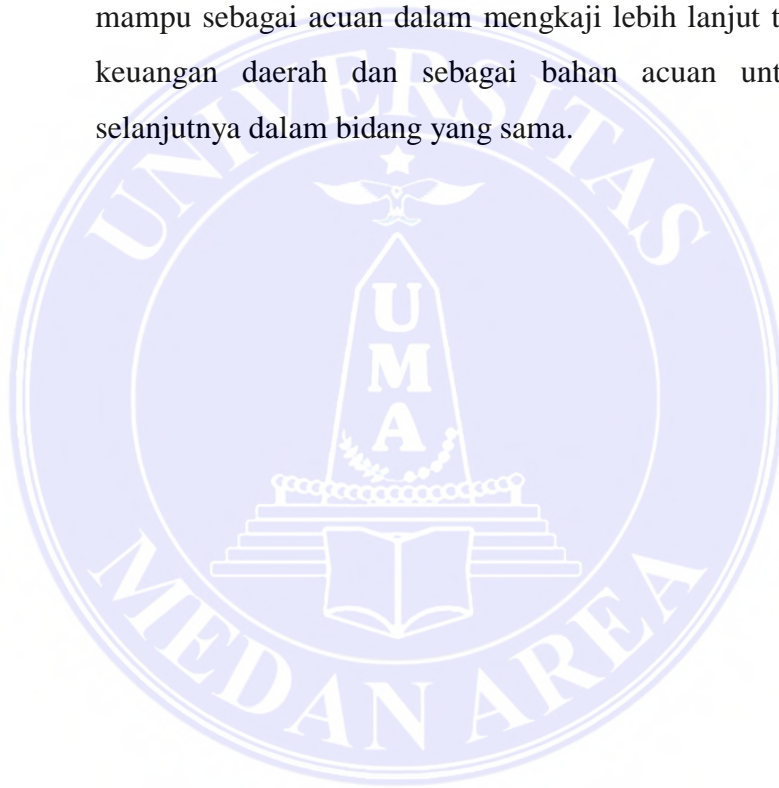
Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Padangsidempuan jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD.
2. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Padangsidempuan jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.
3. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Padangsidempuan jika dilihat dari Rasio Keserasian.
4. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Padangsidempuan jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan.
5. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Padangsidempuan jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis serta pihak-pihak lain yang berkepentingan, yaitu bagi:

1. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang keuangan daerah serta meningkatkan kemampuan analisis tentang kinerja keuangan berdasarkan rasio keuangan.
2. Bagi Pemerintah Daerah, sebagai bahan masukan dan bahan perbandingan atas kinerja yang selama ini diterapkan dan diharapkan menjadi tolak ukur dan bahan pertimbangan keputusan terkait dengan kinerja keuangan Pemerintah daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu sebagai acuan dalam mengkaji lebih lanjut tentang kinerja keuangan daerah dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Analisis Rasio Keuangan

Analisis keuangan merupakan usaha mengenali identitas keuangan bersumber pada laporan keuangan yang ada. Untuk perusahaan swasta (lembaga yang bersifat komersial) analisis rasio keuangan biasanya terdiri atas (Halim, 2012:L-3):

1. Analisis likuiditas ialah rasio yang menggambarkan keahlian perusahaan untuk memenuhi kewajiban dengan segera
2. Rasio *Leverage* merupakan rasio yang mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjam perusahaan dari kreditor
3. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisien tidaknya perusahaan di dalam memakai serta mengatur sumber yang dimiliki perusahaan
4. Rasio profabilitas ialah rasio yang mengukur keahlian perusahaan dalam menciptakan laba.

Rasio-rasio tersebut perlu disusun untuk melayani pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, adalah sebagai berikut:

1. Para kreditor baik jangka pendek ataupun jangka panjang, ialah untuk memperhitungkan keahlian perusahaan dalam penunji kewajibannya.
2. Pemegang saham maupun pemilik perusahaan ialah untuk menganalisis hingga sejauh mana perusahaan mampu membayar deviden maupun mendapatkan laba.
3. Pengelola adalah bagaimana data yang dapat dipakai sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.

Pemakaian analisis rasio pada sektor publik terutama terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada konvensi secara bulat mengenai nama serta kaidah pengukura rasio ini. Sehingga, dalam mengelolah

keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis efektif, efisien, serta akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dipunyai perusahaan swasta (Halim, 2012:L-4).

Menurut Halim (2012:L-4) analisis keuangan dilakukan pada APBD yaitu dengan menyamakan hasil yang dicapai dari satu periode dibanding dengan periode yang sebelumnya sehingga dapat dikenal bagaimana kecenderungan yang terjadi. Tidak hanya itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dipunyai sesuatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain maupun keahlian yang dimiliki daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah yang lainnya.

Menurut Halim (2012:L-5) terdapat sebagian cara untuk mengukur Kinerja Keuangan daerah adalah menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan yang dapat digunakan ialah Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, serta Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

a. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas menggambarkan keahlian pemerintah daerah dalam merealisasikan pemasukan asli daerah yang direncanakan dibanding dengan sasaran yang diresmikan berdasarkan pada kemampuan ril daerah tersebut. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan keahlian ataupun kemampuan daerah tersebut yang terus jadi lebih baik (Halim, 2012:L:6). Rumus rasio efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{RASIO EFEKTIVITAS PAD} = \frac{\text{REALISASI PAD}}{\text{ANGGARAN PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2. 1
Kriteria Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
(x>100%)	Efektif
(x=100%)	Efektif Berimbang
(x<100%)	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, 2010

b. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya bayaran yang dikeluarkan untuk mendapatkan pemasukan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Halim, 2012:L-7). Rumus rasio efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{RASIO EFISIENS I} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti pemerintah daerah semakin baik. Sehingga pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga bisa diketahui bahwa kegiatan pemungutan pendapatan tersebut efisien ataupun tidak (Halim, 2012:L-7).

Tabel 2. 2
Kriteria Pengukuran Efisiensi

Persentase	Kriteria
100% Keatas	Tidak Efisien
100%	Efisien Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

Sumber: Mahsun (2011:187)

c. Rasio Keserasian

Menurut Halim (2012:L-8) rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja teratur dan belanja pembangunan secara maksimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja teratur berarti persentase belanja investasi maupun belanja pembangunan yang digunakan dalam fasilitas prasarana ekonomi masyarakat cenderung terus menjadi kecil. Ada dua perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, adalah Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

1. Rasio Belanja Operasi adalah perbandingan antara total belanja Operasi dengan total belanja daerah. Menurut Mahmudi (2010:164) didalam pemerintahan daerah dengan tingkatan pemasukan porsi belanja operasi yang lebih besar dibandingkan pemerintahan daerah yang tingkatan pendapatannya rendah. Dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Belanja Modal ialah perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Menurut Mahmudi (2010:164) biasanya proporsi belanja daerah merupakan anantara 5-20%, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Belum ada kepastian berapa besarnya rasio belanja operasi maupun modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan

pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan investasi yang telah di targetkan. (Abdul Halim, 2012:L-8).

d. Rasio Pertumbuhan

Menurut Halim (2012;L-12) rasio pertumbuhan (*growth ratio*) merupakan mengukur seberapa besar keahlian pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannyayang sudah dicapai dari periode ke periode selanjutnya. Semakin besar nilai total pendapatan daerah, PAD serta belanja modal yang diiringi oleh semakin rendahnya atau kecilnya bealaanja operasi, hingga pertumbuhannya yakni positif. Yang maksdunya kalau daerah yang bersangkutan sudah sanggup mempertahankan serta meningkatkan pertumbuhan daerahnya dari periode satu ke periode selanjutnya. Rumus menghitung rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PAD } t1 - \text{PAD}t0}{\text{PAD } t0}$$

e. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstren. Semakin besar rasio kemandirian memiliki makna kalau tingkatan ketergantungan daerah terhadap dorongan pihak ekstern (paling utama pemerintah pusat serta provinsi) semakin rendah, serta demikian pula kebalikannya (Abdul Halim, 2012:L6). Rumus rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 2.3
Pola Hubungan dan Tingkat kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Rahmatina, 2011

- a. Pola ikatan Instruktif, kedudukan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. (Daerah yang tidak mampu melakukan otonomi daerah).
- b. Pola ikatan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat telah mulai menurun, sebab wilayah dikira sedikit lebih sanggup melakukan otonomi.
- c. Pola ikatan Partisipatif, peran pemerintah pusat semakin menurun, mengingat wilayah bersangkutan tingkatan kemandiriannya mendekati sanggup melakukan urusan otonomi.
- d. Pola Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak terdapat sebab wilayah sudah betul-betul sanggup serta mandiri dalam melakukan otonomi daerah.

2.2 Penilaian Kinerja Keuangan

Menurut Ratmono dan Sholihin (2017:13) tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, pelaporan keuangan pemerintah daerah (pemda) sepatutnya menyajikan data yang berguna untuk para pengguna dalam memperhitungkan akuntabilitas serta membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik yaitu dengan:

- a. Menyediakan informasi data tentang sumber, alokasi dan pengguna sumber tenaga keuangan,

- b. Menyediakan informasi data menimpa kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran,
- c. Menyediakan informasi data mengenai jumlah sumber daya energi ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan dan hasil-hasil yang telah dicapai,
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan membiayai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya,
- e. Menyediakan informasi menimpa posisi keuangan sdan keadaan entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termaksud yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman,
- f. Menyediakan informasi data menimpa pergantian posisi keuangan entitas pelaporan, apakah menghadapi kenaikan maupun penyusutan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sejauh periode pelaporan.

Pada organisasi pemerintahan daerah, laporan keuangan yang dikehendaki diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 dan pasal 81 ayat (1) Kepmendagri Nomor 29 2002 dan Lampiran XXIX butir (11). Peraturan tersebut diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang mengenai Standar Akuntansi pemerintahan, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan daerah serta Pemendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan wilayah Daerah *jo* Pemendagri No.59 Tahun 2007 tentang pergantian atas Pemendagri No. 13 tahun 2006. Laporan keuangan tersebut yakni sebagai berikut (Halim, 2012:44).

- 1) Laporan realisasi anggaran
- 2) Laporan neraca
- 3) Laporan arus kas

Catatan atas laporan keuangan Kinerja dapat ditafsirkan sebagai sesuatu kegiatan maupun program dalam mewujudkan sasaran dan tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam formulasi skema strategi suatu organisasi (Bastian, 2001:329), sebaliknya evaluasi kinerja yakni proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksana kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa maupun proses (Larry D. Stout dalam

Bastian, 2001:329). Artinya kalau tiap-tiap kegiatan organisasi yakni suatu proses yang tercatat dalam misi dan sejalan dengan tujuan organisasi, dimana kegiatan tersebut dikatakan sukses apabila hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Evaluasi kinerja yakni suatu peralatan untuk meningkatkan kualitas mutu pengambilan keputusan dan akuntabilitas (James B. Whittaker dalam Bastian, 2001:121).

a. Tujuan Penilaian Kinerja

Tujuan utama pengukuran kinerja merupakan untuk membagikan motivasi terhadap karyawan untuk menggapai tujuan organisasi serta dalam memenuhi standar sikap yang telah ditetapkan supaya dapat mencapai hasil yang diidamkan (Nogi, 2003:108).

Secara umum, tujuan penilaian kinerja (Ulum, 2004:277) merupakan:

- 1) Untuk memberikan komunikasi yang strategis secara lebih baik.
- 2) Untuk mengukur kinerja finansial serta non finansial secara tertimbang sehingga bisa ditelusuri pertumbuhan pencapaian strategis.
- 3) Sebagai alat perlengkapan untuk menggapai kepuasan berdasarkan individual serta keahlian kolektif yang rasional.

a) Manfaat Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja memiliki manfaat bagi organisasi (Ulum, 2004:277) ialah:

- 1) Membagikan uraian menimpa dimensi yang digunakan memperhitungkan kinerja manajemen.
- 2) Menampilkan arah pencapaian sasaran kinerja yang sudah ditetapkan.
- 3) Memonitor serta mengevaluasi kinerja dengan menyamakan skema kerja serta penerapannya.
- 4) Membantu mengungkap dan memecahkan permasalahan yang ada.
- 5) Membantu memahami proses aktivitas lembaga pemerintah.
- 6) Memastikan kalau pengambilan keputusan dicoba secara objektif.

Setelah berlakunya peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP, laporan keuangan yang wajib disajikan oleh pemerintah daerah paling lambat tahun anggaran 2012 ialah sebagai berikut (Halim, 2012:44)

1. Pelaporan penerapan anggaran (budgetary reports)

- a. Laporan realisasi anggaran (LRA)
- b. Laporan pergantian saldo anggaran lebih (SAL)
2. Pelaporan Finansial (financial reports)
 - a. Neraca
 - b. Laporan operasional (LO)
 - c. Laporan pergantian ekuitas
 - d. Laporan arus kas
3. Catatan atas laporan keuangan (CaLK)

Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen-komponen yang terapat dalam sesuatu laporan keuangan pokok yaitu:

- a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan yang mengatakan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, aplikasi dan konsumsi sumber energi ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.

Dalam Pemandagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan aspek yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari:

- 1) Pendapatan, yaitu seluruh penerimaan kas daerah yang menaikkan ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang jadi hak PEMDA, dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan dipecah menjadi 3 yaitu:
 - a. Pendapatan Asli daerah
 - b. Dana Perimbangan
 - c. Lain-lain pendaptan yang sah
- 2) Belanja, ialah seluruh pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, serta tidak hendak diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemda. Belanja dibagi menjadi 3 jenis yaitu:
 - a. Belanja Aparatur Daerah
 - b. Belanja Pelayanan Publik
 - c. Belanja untuk hasil seeta bantuan keuangan

3) Pembiayaan ialah tiap penerimaan yang perlu dibayar kembali serta/ataupun pengeluaran yang hendak diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan ataupun tahun-tahun anggaran selanjutnya, yang dalam penganggaran Pemda paling utama dimaksudkan untuk menutupi defisit ataupun memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan dikelompokkan menjadi:

- a. Sisa lebih anggaran penerimaan tahun lalu
- b. Penerimaan pinjaman serta obligasi
- c. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan
- d. Transfer dari dana cadangan
- e. Sumber pengeluaran daerah, yaitu
 1. Pembayaran hutang pokok yang sudah jatuh tempo
 2. Penyertaan Modal
 3. Transfer ke dana cadangan
 4. Sisa lebih anggaran tahun sekarang

2.3 Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Ratmono dan Sholihin (2017:6) Dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 disebutkan bahwa defenisi keuangan daerah ialah seluruh hak serta kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bisa dinilai dengan uang termaksud di dalamnya seluruh kekayaan yang berhubungan dengan hak serta kewajiban daerah tersebut.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan keluaran/hasil dari aktivitas/program yang hendak ataupun sudah dicapai sehubungan dengan pemakaian anggaran daerah dengan kualitas serta kuantitas yang terukur, kemampuan daerah bisa diukur dengan memperhitungkan efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Sumarjo, 2010).

Pemerintah daerah bagikan pihak yang diberikan tugas melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas laporan keuangan daerahnya untuk dinilai apakah daerah tersebut sukses melaksanakan tugasnya dengan baik ataupun tidak. Salah satu perlengkapan buat menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dengan melakukan analisis rasio keuangan

terhadap kinerja keuangan daerah yang sudah ditetapkan serta dilaksanakannya (Halim, 2012:L-2).

Untuk memperhitungkan atau menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, yakni dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang antara lain Rasio efektivitas PAD, Rasio Efisiensi PAD, Rasio Keserasian, Rasio pertumbuhan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Halim, 2012:L-2):

Menurut Wachid (2012:2) pengelolaan keuangan daerah ialah totalitas penerapan aktivitas yang meliputi perencanaan, penerapan, penatausahaan. Pelaporan serta pengawasan keuangan daerah.

Di dalam skripsi Rindang Arumdari (2019:16) Dalam jurnal Menurut UU No.12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam uraian universal pasal 156 ayat (1) disebutkan, penafsiran keuangan daerah ialah segala hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berbentuk uang serta benda yang bisa dijadikan kepunyaan ataupun milik daerah tersebut yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah pusat yang cocok dengan urusan pemerintah pusat yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendaya gunakan pajak serta retribusi daerah serta hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang terletak di daerah dan perimbangan yang lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah serta mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang lainnya yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Analisis kinerja keuangan ialah usaha yang mengenali identitas ataupun bukti diri keuangan yang bersumber pada laporan keuangan yang ada. Analisis keuangan yang dimaksudkan untuk menolong bagaimana metode ataupun cara memahami laporan keuangan tersebut, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan serta bagaimana mengevaluasi laporan keuangan serta bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Salah satu laporan pertanggung jawaban keuangan daerah yang kerap di analisis untuk melihat kinerja keuangan pemerintah daerah ialah Laporan Realisasi

Anggaran (LRA). Berdasarkan LRA tersebut pembaca dapat membuat analisis laporan keuangan berbentuk analisis pendapatan, analisis belanja, serta analisis pembiayaan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 4

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Wakhyudi (2013)	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Rasio Keuangan Daerah	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah Kabupaten Bogor didalam mengelola keuangan daerahnya sendiri masih rendah. Selain itu, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dihadapkan pada beberapa hambatan yaitu: penetapan Perda APBD dan Perda perubahan APBD setiap tahunnya belum dan penganggarannya belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.
2	Heri Tryono (2013)	Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Kabupaten Sukaharjo APBD 2009-2011	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian rendah dengan tingkat ketergantungan dari pihak eksternal masih tinggi. rasio efektifitas yang dicapai tinggi. Rasio efisiensi menunjukkan dalam memungut PAD sudah efisien. Rasio aktivitas pada pebanja pembangunan masih rendah . rasio pertumbuhan menunjukkan hasil yang positif . rasio derajat desentralisasi rendah.
3	Joko Pramono (2014)	Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)	Menunjukkan bahwa Kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta untuk tahun 2010 dan 2011 yang masih kurang atau perlu menjadi perhatian adalah pada aspek kemandirian dan aspek keserasian. Kemandirian pemerintah Kota Surakarta dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih sangat rendah, karena rasionya hanya sebesar 15,83% (2010) dan 24,44% (2011).

4	Listiyani Natalia (2015)	Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan di pemerintah Kabupaten Sleman baik, dalam merealisasikan belanja daerahnya sudah efisien karena tidak melebihi anggaran. Namun ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi.
---	--------------------------	--	---

2.5 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual ialah modal konseptual tentang bagaimana teori yang digunakan berhubungan dengan berbagai aspek yang sudah penulis identifikasi sebagai masalah penting. Kinerja keuangan daerah adalah cerminan atau gambaran keadaan tingkatan pencapaian suatu daerah yang telah dicapai pada periode tertentu, yang biasanya dihitung dengan menggunakan rasio keuangan.

Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati merupakan pengelolaan keuangan daerah dan anggaran belanja. Anggaran pendapatan serta belanja daerah yang kemudian disingkat menjadi APBD ialah sesuatu rencana keuangan tahunan daerah yang diresmikan bersumber pada peraturan daerah. (Nordiawan, dkk, 2017:39).

Menurut Halim (2012) salah satu metode untuk menganalisa kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya ialah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah (APBD) yang sudah diresmikan serta dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan pemerintah daerah yang diantaranya Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi PAD, Rasio Keserasian, Rasio pertumbuhan serta Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

1) Rasio Efektivitas PAD

Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan keahlian ataupun kemampuan daerah tersebut yang terus jadi lebih baik. (Halim,2012:L:6).

2) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya bayaran yang dikeluarkan untuk mendapatkan pemasukan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Halim, 2012:L-7).

3) Rasio Keserasian

Menurut Halim (2012:L-8) rasio ini menggambarkan bagaimanapemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja teratur serta belanja pembangunan secara maksimal.

4) Rasio Pertumbuhan

Menurut Halim (2012:L-12) rasio pertumbuhan (*growth ratio*) merupakan mengukur seberapa besar keahlian pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannyayang sudah dicapai dari periode ke periode selanjutnya.

5) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstren. Semakin besar rasio kemandirian memiliki makna kalau tingkatan ketergantungan daerah terhadap bendorongan pihak ekstern (paling utama pemerintah pusat serta provinsi) semakin rendah, serta demikian pula kebalikannya (Halim, 2012:L6).

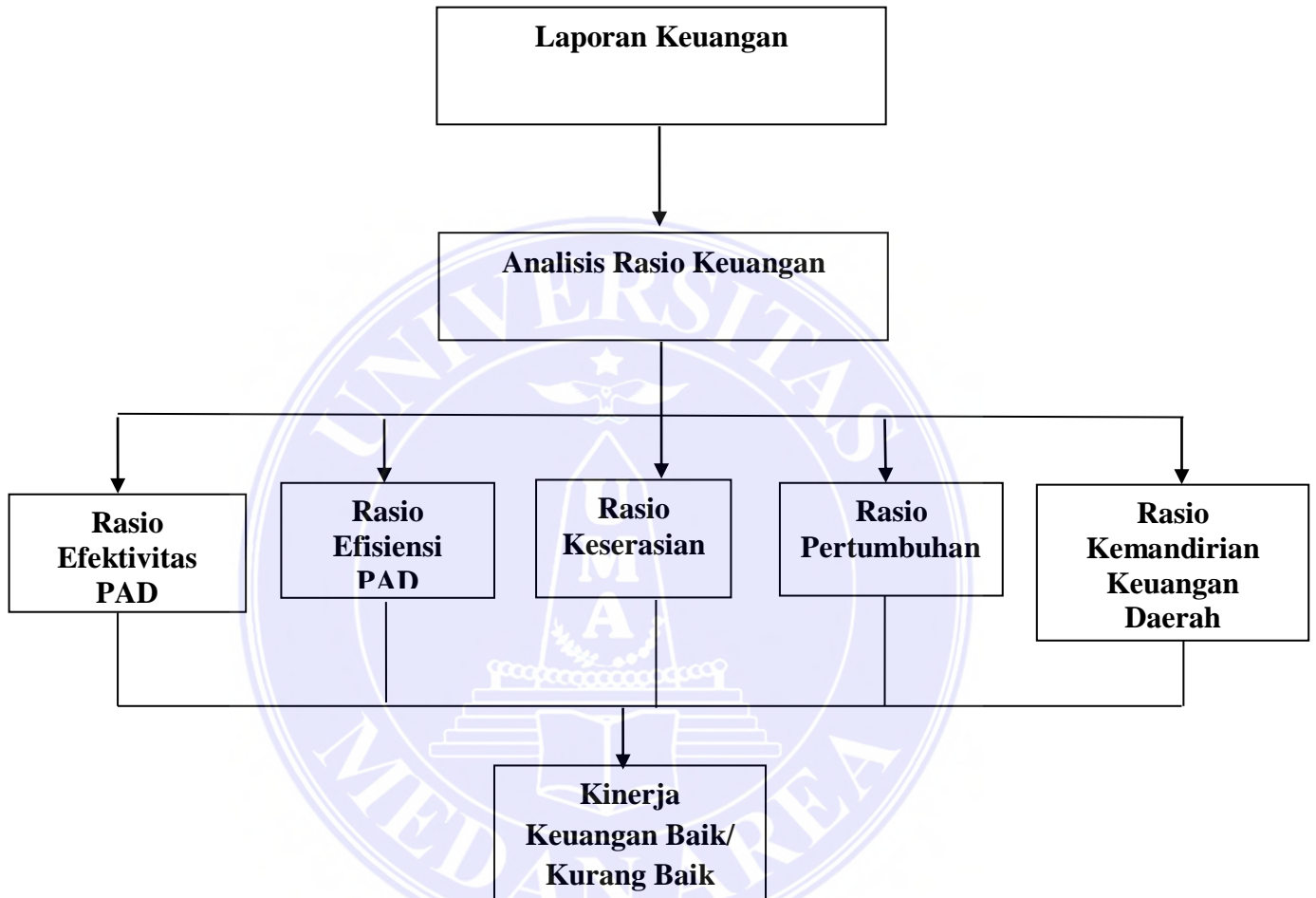
Hasil analisis rasio keuangan berikutnya dipergunakan bagaikan tolak ukur dalam memperhitungkan (Halim, 2012:L-2):

- 1) Memperhitungkan kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- 2) Mengukur daya guna serta efesiensi dalam merealisasikan pemasukan daerah.
- 3) Mengukur sejauh mana kegiatan pemerintah daerah dalam memebelanjakan pemasukan daerahnya.
- 4) Mengukur kontribusi tiap-tiap sumber pemasukan dalam pembentukan pemasukan daerah.
- 5) Melihat perkembangan perolehan pemasukan serta pengeluaran yang dicoba sepanjang periode waktu tertentu.

Penelitian ini sempat dicoba oleh peneliti sebelumnya, Addina Marizka (2010) dari hasil penelitian menampilkan kalau Pemerintah Kota Medan dalam

merealisasikan pendapatan pada tahun 2003-2007 bisa dikatakan efektif serta efisien, perkembangan pemasukan menampilkan perkembangan positif.

Untuk memperjelas konsep serta arah penelitian, maka penulis membuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang penulis gunakan merupakan penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2003:11) penelitian deskriptif ialah penelitian yang dicoba untuk mengenali nilai variabel mandiri tanpa membuat perbandingan, ataupun menghubungkan dengan variabel yang lain.

3.3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Padangsidempuan yang berlokasi di Jln. Jen. Dr. Abd. Haris Nasution Pal-VI Pijorkoling Kec. Padangsidempuan Tenggara.

3.3.3 Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan dari bulan November 2020 hingga Januari 2021. Berikut rincian penelitian yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3. 1
Rencana Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2020/2021									
		Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	April	Mei	
1	Penyusunan Proposal										
2	Seminar Proposal										
3	Pengumpulan Data										
4	Analisis Data										
5	Seminar Hasil										
6	Pengajuan Meja Hijau										
7	Meja Hijau										

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan pemerintah daerah yang di peroleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padangsidempuan tahun 2016-2019.

3.2.2 Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Pemerintah Kota Padangsidempuan tahun 2016-2019.

3.3 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel berupa rasio-rasio keuangan yang relevan yaitu:

a. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli daerah

Rasio Efektivitas menggambarkan keahlian pemerintah daerah dalam merealisasikan pemasukan asli daerah yang direncanakan dibanding dengan sasaran yang diresmikan berdasarkan pada kemampuan ril daerah tersebut. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan keahlian ataupun kemampuan daerah tersebut yang terus jadi lebih baik. Rumus rasio efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{RASIO EFEKTIVITAS PAD} = \frac{\text{REALISASI PAD}}{\text{ANGGARAN PAD}} \times 100\%$$

b. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya bayaran yang dikeluarkan untuk mendapatkan pemasukan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rumus rasio efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{RASIO EFISIENSI} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

c. Rasio Keserasian

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja teratur dan belanja pembangunan secara maksimal. Ada dua perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, adalah Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

1. Rasio Belanja Operasi

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Belanja Modal

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja daerah}} \times 100\%$$

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) merupakan mengukur seberapa besar keahlian pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang sudah dicapai dari periode ke periode selanjutnya. Semakin besar nilai total pendapatan daerah, PAD serta belanja modal yang diiringi oleh semakin rendahnya atau kecilnya belanja operasi, hingga pertumbuhannya yakni positif. Yang maksudnya kalau daerah yang bersangkutan sudah sanggup mempertahankan serta meningkatkan pertumbuhan daerahnya dari periode satu ke periode selanjutnya. Rumus menghitung rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PAD } t1 - \text{PAD } t0}{\text{PAD } t0}$$

e. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstren. Semakin besar rasio kemandirian memiliki makna kalau tingkatan ketergantungan daerah terhadap dorongan pihak ekstern (paling utama pemerintah pusat serta provinsi) semakin rendah, serta demikian pula kebalikannya. Rumus rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kuantitatif . Sedangkan sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh dari Pemerintah Kota Padangsidempuan.

3.5 Teknik dan Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersifat historis, yakni data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Padangsidempuan 2016-2019 dan selanjutnya mencari sumber teori terkait penelitian yang sejenis yang sudah di publish melalui jurnal-jurnal penelitian di website.

3.5 Teknik Analisis Data

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tolak ukur yang digunakan dalam teknik analisis ini adalah rasio keuangan sebagai berikut:

- a. Rasio Efektivitas PAD (Halim:2012)

Rumus mencari Rasio Efektivitas adalah:

$$\text{RASIO EFEKTIVITAS PAD} = \frac{\text{REALISASI PAD}}{\text{ANGGARAN PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3. 2

Kriteria Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
(x>100%)	Efektif
(x=100%)	Efektif Berimbang
(x<100%)	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, 2010

b. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rumus mencari Rasio Efisiensi Keuangan daerah

$$\text{RASIO EFISIENSI} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3. 3

Kriteria Pengukuran Efisiensi

Persentase	Kriteria
100% Keatas	Tidak Efisien
100%	Efisien Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

Sumber: Mahsun (2011:187)

c. Rasio Keserasian

Ada dua perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, adalah Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal dengan rumus dibawah ini:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja daerah}} \times 100\%$$

d. Rasio Pertumbuhan

Rumus menghitung rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PAD } t1 - \text{PAD}t0}{\text{PAD } t0}$$

e. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rumus Mencari Rasio Kemandirian Keuangan daerah sebagai berikut:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 3. 4

Pola Hubungan dan Tingkat kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Rahmatina, 2011

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Padangsidempuan jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD dikatakan kurang efektif. Dikarenakan efektivitas kinerja keuangan Kota Padangsidempuan rata-rata efektivitasnya masih dibawah 100%.
2. Kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Padangsidempuan jika dilihat dari Rasio efisiensi PAD sudah efisien, karena pemerintah sudah mampu menekan jumlah belanja daerahnya dan mampu menyeimbangkan pendapatan dan belanja daerahnya..
3. Kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Padangsidempuan jika dilihat dari Rasio Keserasian belum stabil dari tahun ke tahun. Sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kota Padangsidempuan masih digunakan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga belanja modal relatif sedikit.
4. Kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Padangsidempuan jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan jika dilihat dari tahun ke tahun pertumbuhan pendapatan mengalami kenaikan maka dapat dikatakan Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kota Padangsidempuan mengalami pertumbuhan secara positif.
5. Kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Padangsidempuan jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong rendah dan dalam katagori pola hubungan Instruktif yang artinya adalah dimana kedudukan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Padangsidempuan

Pemerintah Kota Padangsidempuan diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerahnya yaitu lebih giat lagi dalam menggali, mengembangkan serta mencari sumber-sumber yang baru yang berpotensi menambah PAD, baik melalui objek pajak maupun retribusi sehingga pendapatan kedepannya lebih mencapai tingkat kemandirian daerah Kota Padangsidempuan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan keuangan daerah yang sebenarnya. Selain itu, diharapkan peneliti selanjutnya menambah lagi jangka waktu penelitian, tidak hanya 4 tahun saja. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lingkup wilayah penelitian, tidak hanya mengambil dari 1 pemerintahan saja tetapi lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Heri Triyono.(2013). "*Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sukaharjo APBD 2009-2011*". Skripsi. Fakultas ekonomi Unniversitas Muhammadiyah Surakarta
- Joko Pramono.(2014). "Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)". *Jurnal Among Makarti*. Vol.7 No.13, Juli 2014.
- Listiyani Natalia.(2015). "Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman". *Jurnal Sosio-Humaniora*. Vol.6 No. 1 Mei 2015.
- Lazyra Ks.(2016). "*Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan*". Skripsi Fakultas Ekonomi Unniversitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: PT. Erlangga
- Mahsun, Mohammad. (2011). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta.
- Nordiawan, Dkk. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat
- Sumarjo, Hendro. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Vol.8 No.1 Tahun 2011
- Puput Risky Pramita.(2015). "*Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013*". Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rahmatina, Aulia Zhufinsa Nur. (2011). "*Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005-2009*". Skripsi Institut Manajemen Telkom Bandung.

Ratmono, Dwi dan Mahfud Sholihin. (2017). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Rindang Arumdari.(2019). "*Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan*". Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Ulum, Ihyaul. (2010). "Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Raja Garfindo

Wakhyudi. (2013). "Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Rasio Keuangan Daerah". *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*. Vol. 1 No. 2, 2013.





Lampiran 1 Laporan Keuangan Kota Padangsidempuan Tahun 2016-2019

Lampiran 1 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tanggal 16 Oktober 2017

PEMERINTAH KOTA PADANGSIDEMPUNAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 TAHUN ANGGARAN 2016

KODIR UNIT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
3	PENDAPATAN	882.135.995.056,00	817.199.713.937,26	(64.936.281.118,74)	92,64
3.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	84.503.351.787,00	78.417.755.706,26	(6.085.596.080,74)	92,80
3.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	13.425.081.910,00	12.561.944.283,00	(863.137.627,00)	93,57
3.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	52.068.000.000,00	49.249.408.040,00	(2.818.591.959,99)	94,59
3.1.3	Pendapatan Hasil Penghasilan Karyawan Daerah Yang Dipisahkan	10.822.040.877,00	10.832.040.877,00	0,00	100,00
3.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.178.224.000,00	5.774.357.501,26	(2.403.866.498,74)	70,61
3.2	PENDAPATAN TRANSFER	797.632.643.269,00	738.781.958.230,99	(58.850.685.038,01)	92,63
3.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	726.917.700.000,00	666.941.906.384,00	(59.975.793.616,00)	91,75
3.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	18.870.310.000,00	19.046.462.357,00	176.152.357,00	100,93
3.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	2.956.809.000,00	2.124.017.917,00	(832.791.083,00)	71,82
3.2.1.3	Dana Alokasi Umum	507.686.410.000,00	507.686.410.000,00	0,00	100,00
3.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	197.404.070.000,00	138.084.975.110,00	(59.319.094.889,00)	69,95
3.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	27.515.358.000,00	26.526.444.690,00	(988.913.310,00)	97,86
3.2.2.1	Dana Penyetaraan	27.515.358.000,00	26.526.444.690,00	(988.913.310,00)	97,86
3.2.2.2	Transfer Pemerintah Provinsi	15.466.712.669,00	14.041.870.557,00	(1.424.842.112,00)	90,84
3.2.3	Pengalangan Bagi Hasil Pajak	7.732.872.600,00	4.871.736.600,00	(2.861.136.000,00)	63,00
3.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.732.872.600,00	4.871.736.600,00	(2.861.136.000,00)	63,00
3.3.1	Pendapatan Lainnya	7.732.872.600,00	4.871.736.600,00	(2.861.136.000,00)	63,00
3	BELANJA	924.683.907.383,00	854.914.664.329,00	(69.769.242.954,00)	92,45
3.1	BELANJA OPERASI	745.841.825.280,00	695.405.722.908,00	(50.436.102.372,00)	93,24
3.1.1	Belanja Pegawai	489.949.805.362,00	458.920.459.073,00	(31.029.346.289,00)	93,67
3.1.2	Belanja Barang	215.480.958.021,00	198.221.379.995,00	(17.259.578.026,00)	91,59
3.1.5	Belanja Hibah	5.770.066.000,00	4.887.400.000,00	(882.666.000,00)	84,70
3.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.773.637.897,00	3.509.146.240,00	(1.264.491.657,00)	73,51
3.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	29.867.358.000,00	29.867.358.000,00	0,00	100,00
3.2	BELANJA MODAL	178.642.082.000,00	159.508.881.421,00	(19.133.200.579,00)	89,29

Lampiran 1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 16/10/2017

KODIR UNIT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
3.2.1.1	Belanja Pegawai	1.278.030.000,00	1.177.284.000,00	(100.746.000,00)	92,29
3.2.1.2	Belanja Pengadaan Barang	30.885.504.000,00	28.258.700.000,00	(2.626.804.000,00)	91,51
3.2.1.3	Belanja Bahan, Bahan Baku, Jasa, dan Jasa Lain	37.278.795.305,00	35.000.000.000,00	(2.278.795.305,00)	93,89
3.2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	108.298.808.000,00	95.482.731.175,00	(12.816.076.825,00)	88,25
3.2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan	1.146.335.000,00	1.139.618.200,00	(6.716.800,00)	99,54
3.2.2	BELANJA TAK TERDUGA	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00
3.2.2.1	Biaya Tak Terduga	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(42.547.912.227,00)	(37.714.950.391,74)	4.832.961.835,26	88,64
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH				
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	45.111.412.833,00	45.111.412.833,00	0,00	100,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH				
3.2.1	Penyediaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.563.500.606,00	2.201.810.531,00	(361.690.075,00)	85,89
3.2.2	Pembayaran Pajak Utang	2.304.338.106,00	1.942.648.051,00	(361.690.055,00)	84,30
3.2.3		259.162.500,00	259.162.500,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	42.547.912.227,00	42.909.602.782,20	361.690.555,20	100,85
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	3.194.711.890,46	3.194.711.890,46	0,00

Diundangkan di Padangsidempuan pada tanggal 16 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANGSIDEMPUNAN, Ttd. ZULFEDDI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Irfan Ridho Nasution NIP. 19751026 200212 1 009

Padangsidempuan, Walikota Padangsidempuan, Ttd. ANDAR AMIN HARAHAP

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDEMPUNAN TAHUN 2017 NOMOR 3

Lampiran 1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 16/10/2017

PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017
DAN 2016

Uraian	Ref/ CaLK	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	(%)	Realisasi 2016 (Rp)
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN	4.1.1	890.152.493.657,00	862.276.641.422,55	96,87	817.199.713.937,26
PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.1.1.1	120.211.679.947,00	109.461.798.932,55	91,06	78.417.755.706,26
Pendapatan Pajak Daerah	4.1.1.1.1	15.032.779.855,00	15.644.948.890,00	104,07	12.561.944.283,00
Pendapatan Retribusi Daerah	4.1.1.1.2	13.478.789.140,00	9.035.095.522,70	67,03	49.249.408.045,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.1.1.1.3	16.877.726.952,00	16.877.726.952,00	100,00	10.832.045.877,00
Lain-lain PAD yang Sah	4.1.1.1.4	74.822.384.000,00	67.904.027.567,85	90,75	5.774.357.501,26
PENDAPATAN TRANSFER	4.1.1.2	755.880.813.710,00	738.046.842.490,00	97,64	738.720.458.231,00
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	4.1.1.2.1	682.255.748.000,00	673.189.397.118,00	98,67	666.941.906.384,00
Dana Bagi Hasil Pajak	4.1.1.2.1.1	18.536.044.000,00	16.303.454.297,00	87,96	19.046.482.357,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	4.1.1.2.1.2	2.932.057.000,00	1.587.556.662,00	54,14	2.124.017.917,00
Dana Alokasi Umum	4.1.1.2.1.3	498.768.033.000,00	498.768.033.000,00	100,00	507.686.451.000,00
Dana Alokasi Khusus	4.1.1.2.1.4	162.019.614.000,00	156.530.353.159,00	96,61	138.084.975.110,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	4.1.1.2.2	34.650.201.000,00	34.650.201.000,00	100,00	26.926.444.690,00
Dana Penyesuaian		34.650.201.000,00	34.650.201.000,00	100,00	26.926.444.690,00
Transfer Pemerintah Provinsi - Bagi Hasil Pendapatan	4.1.1.2.3	38.974.864.710,00	30.207.244.372,00	77,50	44.852.107.157,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	4.1.1.2.3.1	38.974.864.710,00	30.207.244.372,00	77,50	40.041.870.557,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya	4.1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	4.810.236.600,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4.1.1.3	14.060.000.000,00	14.768.000.000,00	105,04	61.500.000,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	4.1.1.3.1	14.000.000.000,00	14.690.000.000,00	104,93	0
Pendapatan Lainnya	4.1.1.3.2	60.000.000,00	78.000.000,00	130,00	61.500.000,00
BELANJA	4.1.2	847.730.545.644,00	795.464.608.419,00	93,83	825.047.246.329,00
BELANJA OPERASI	4.1.2.1	647.989.100.632,00	610.698.963.601,00	94,25	665.538.364.908,00
Belanja Pegawai	4.1.2.1.1	428.572.889.886,00	411.422.462.581,00	96,00	458.920.459.073,00
Belanja Barang dan Jasa	4.1.2.1.2	203.365.210.146,00	183.834.300.420,00	90,40	198.221.339.595,00
Belanja Hibah	4.1.2.1.3	12.248.550.600,00	12.138.550.600,00	99,10	4.887.400.000,00
Belanja Bantuan Sosial	4.1.2.1.4	3.802.450.000,00	3.303.650.000,00	86,88	3.509.166.240,00
BELANJA MODAL	4.1.2.2	198.641.445.012,00	184.093.967.563,00	92,68	159.508.881.421,00
Belanja Tanah	4.1.2.2.1	1.170.625.000,00	1.157.212.000,00	98,85	1.177.186.900,00
Belanja Peralatan dan Mesin	4.1.2.2.2	34.808.366.599,00	31.000.859.824,00	89,06	26.258.700.682,00
Belanja Gedung dan Bangunan	4.1.2.2.3	52.241.828.900,00	48.130.674.050,00	92,13	35.260.646.464,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.1.2.2.4	106.304.772.925,00	99.699.970.101,00	93,79	95.682.731.175,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	4.1.2.2.5	4.115.851.588,00	4.105.251.588,00	99,74	1.129.616.200,00

Uraian	Reff CaLK	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	(%)	Realisasi 2016 (Rp)
1	2	3	4	5	6
BELANJA TAK TERDUGA	4.1.2.3	1.100.000.000,00	671.677.255,00	61,06	0,00
Belanja Tak Terduga		1.100.000.000,00	671.677.255,00	61,06	0,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	4.1.2.4	38.264.368.897,00	38.184.820.131,00	99,79	29.867.358.000,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	4.1.2.4.1	37.422.301.000,00	37.422.201.000,00	100,00	29.867.358.000,00
Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik	4.1.2.4.2	842.067.897,00	762.619.131,00	90,57	
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		885.994.914.541,00	833.649.428.550,00	94,09	854.914.604.329,00
SURPLUS/DEFISIT		4.157.579.116,00	28.627.212.872,55	688,55	(37.714.890.391,74)
PEMBIAYAAN	4.1.3				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4.1.3.1	5.194.711.890,00	5.203.211.890,46	100,16	45.111.412.833,20
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	4.1.3.1.1	5.194.711.890,00	5.194.711.890,46	100,00	45.111.412.833,20
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	4.1.3.1.2	0,00	8.500.000,00		0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.1.3.2	9.352.291.006,00	9.284.683.506,00	99,28	2.201.810.551,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.1.3.2.1	9.095.308.506,00	9.035.308.506,00	99,34	1.942.648.051,00
Pembayaran Pokok Utang	4.1.3.2.2	256.982.500,00	249.375.000,00	97,04	259.162.500,00
PEMBIAYAAN NETTO		(4.157.579.116,00)	(4.081.471.615,54)	98,17	42.909.602.282,20
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		0,00	24.545.741.257,01		5.194.711.890,46

PJ. WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN



SARMADAN HASIBUAN

PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018
DAN 2017

Uraian	Reff CaLK	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)	Realisasi 2017 (Rp)
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN	4.1.1	845.225.285.360,00	808.686.340.887,73	95,68	862.469.261.770,85
PENDAPATAN DAERAH ASLI	4.1.1.1	91.150.238.478,00	75.063.575.092,73	82,35	109.640.419.280,56
Pendapatan Pajak Daerah	4.1.1.1.1	18.538.779.855,00	18.389.003.847,67	99,19	15.653.314.656,00
Pendapatan Retribusi Daerah	4.1.1.1.2	12.183.878.200,00	9.385.098.953,91	77,03	9.035.095.522,70
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.1.1.1.3	14.649.196.423,00	9.257.124.074,00	63,18	16.877.726.982,00
Lain-lain PAD yang Sah	4.1.1.1.4	45.778.384.000,00	38.037.348.217,15	83,09	68.074.282.149,85
PENDAPATAN TRANSFER	4.1.1.2	728.323.246.872,00	708.129.645.775,00	97,23	738.046.842.490,00
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	4.1.1.2.1	656.008.951.340,00	641.431.373.569,00	97,78	673.189.397.118,00
Dana Bagi Hasil Pajak	4.1.1.2.1.1	18.175.071.163,00	14.443.492.351,00	79,47	16.303.454.297,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	4.1.1.2.1.2	3.924.645.000,00	4.082.749.967,00	104,03	1.587.556.662,00
Dana Alokasi Umum	4.1.1.2.1.3	498.221.822.177,00	498.221.822.177,00	100,00	498.768.033.000,00
Dana Alokasi Khusus	4.1.1.2.1.4	135.687.423.000,00	124.683.309.074,00	91,89	156.530.353.159,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	4.1.1.2.2	33.662.556.000,00	33.662.556.000,00	100,00	34.650.201.000,00
Dana Penyesuaian		33.662.556.000,00	33.662.556.000,00	100,00	34.650.201.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi - Bagi Hasil Pendapatan	4.1.1.2.3	38.651.729.532,00	33.035.716.206,00	85,47	30.207.244.372,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	4.1.1.2.3.1	25.451.729.532,00	21.530.079.846,00	84,59	30.207.244.372,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya	4.1.1.2.3.2	13.200.000.000,00	11.505.636.360,00	87,16	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4.1.1.3	25.751.800.000,00	25.493.120.000,00	99,00	14.768.000.000,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	4.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	14.690.000.000,00
Pendapatan Lainnya	4.1.1.3.2	25.751.800.000,00	25.493.120.000,00	99,00	78.000.000,00
BELANJA	4.1.2	831.076.445.605,00	784.816.322.336,49	94,43	795.678.040.590,00
BELANJA OPERASI	4.1.2.1	706.043.906.268,00	671.744.260.962,59	95,14	610.912.395.772,00
Belanja Pegawai	4.1.2.1.1	431.738.819.585,00	417.897.106.146,00	96,79	411.422.462.581,00
Belanja Barang	4.1.2.1.2	250.823.757.483,00	232.434.200.669,00	92,67	184.047.732.591,00
Belanja Hibah	4.1.2.1.3	18.699.529.200,00	17.453.352.147,59	93,34	12.138.550.600,00
Belanja Bantuan Sosial	4.1.2.1.4	4.781.800.000,00	3.959.600.000,00	82,81	3.303.650.000,00
BELANJA MODAL	4.1.2.2	124.932.539.337,00	113.072.061.373,90	90,51	184.093.967.563,00
Belanja Tanah	4.1.2.2.1	300.000.000,00	0,00	0,00	1.157.212.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	4.1.2.2.2	26.558.468.532,00	24.295.728.893,90	91,48	31.000.859.824,00
Belanja Gedung dan	4.1.2.2.3	44.013.416.507,00	37.723.131.699,00	85,71	48.130.674.050,00

Uratan	Reff CaLK	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)	Realisasi 2017 (Rp)
1	2	3	4	5	6
Bangunan					
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.1.2.2.4	47.673.253.774,00	44.683.222.824,00	93,73	99.699.970.101,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	4.1.2.2.5	6.387.400.524,00	6.369.977.957,00	99,73	4.105.251.588,00
BELANJA TAK TERDUGA	4.1.2.3	100.000.000,00	0,00	0,00	671.677.255,00
Belanja Tak Terduga		100.000.000,00	0,00	0,00	671.677.255,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	4.1.2.4	36.874.576.788,00	36.845.082.195,00	99,92	38.184.820.131,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	4.1.2.4.1	36.014.556.000,00	36.014.556.000,00	100,00	37.422.201.000,00
Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik	4.1.2.4.2	860.020.788,00	830.526.195,00	96,57	762.619.131,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		867.951.022.393,00	821.661.404.531,49	94,67	833.862.860.721,00
SURPLUS/DEFISIT		(22.725.737.043,00)	(12.975.063.663,76)	57,09	28.592.401.049,55
PEMBIAYAAN	4.1.3				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4.1.3.1	24.510.929.434,00	24.510.929.434,01	100,00	5.203.211.890,46
Pergunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	4.1.3.1.1	24.510.929.434,00	24.510.929.434,01	100,00	5.194.711.890,46
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	4.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.1.3.2	1.785.192.391,00	1.573.536.340,00	88,14	9.284.683.506,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.1.3.2.1	1.784.372.391,00	1.572.716.340,00	88,14	9.035.308.506,00
Pembayaran Pokok Utang	4.1.3.2.2	820.000,00	820.000,00	100,00	249.375.000,00
PEMBIAYAAN NETTO		22.725.737.043,00	22.937.393.094,01	100,93	(4.081.471.615,54)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		0,00	9.962.329.430,25	0,00	24.510.929.434,01

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

IRSAN EFENDI NASUTION

PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019
DAN 2018

Uraian	Reff CaLK	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Realisasi 2018 (Rp)
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN	4.1.1	919.478.494.495,00	885.452.087.050,14	96,30	808.886.340.867,73
PENDAPATAN DAERAH ASLI	4.1.1.1	97.944.798.103,00	87.432.283.185,14	89,27	75.063.575.092,73
Pendapatan Pajak Daerah	4.1.1.1.1	19.058.547.515,00	18.577.289.231,00	97,47	18.389.003.847,87
Pendapatan Retribusi Daerah	4.1.1.1.2	13.651.229.542,00	10.226.630.196,00	74,91	9.385.098.953,91
Pendapatan Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.1.1.1.3	18.256.662.530,00	17.389.342.764,00	95,25	9.252.124.074,00
Lain-lain PAD yang Sah	4.1.1.1.4	46.978.358.516,00	41.239.020.994,14	87,78	38.037.348.217,15
PENDAPATAN TRANSFER	4.1.1.2	796.547.296.392,00	771.186.283.865,00	96,82	708.129.645.775,00
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	4.1.1.2.1	713.510.036.000,00	693.704.664.371,00	97,22	641.431.373.589,00
Dana Bagi Hasil Pajak	4.1.1.2.1.1	14.730.608.000,00	10.327.717.597,00	70,11	14.443.492.351,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	4.1.1.2.1.2	5.571.607.000,00	3.746.401.579,00	67,24	4.082.749.967,00
Dana Alokasi Umum	4.1.1.2.1.3	524.337.438.000,00	524.337.438.000,00	100,00	498.221.822.177,00
Dana Alokasi Khusus Fisik	4.1.1.2.1.4	94.937.629.000,00	90.932.171.136,00	95,78	51.578.238.121,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	4.1.1.2.1.5	73.932.754.000,00	64.360.936.059,00	87,05	73.105.070.953,00
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	4.1.1.2.2	39.678.754.000,00	39.678.754.000,00	100,00	33.662.556.000,00
Dana Penyesuaian		39.678.754.000,00	39.678.754.000,00	100,00	33.662.556.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi – Bagi Hasil Pendapatan	4.1.1.2.3	43.358.506.392,00	37.802.865.494,00	87,19	33.035.716.206,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	4.1.1.2.3.1	43.358.506.392,00	37.802.865.494,00	87,19	21.530.079.846,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya	4.1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	11.505.636.360,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4.1.1.3	24.986.400.000,00	26.833.520.000,00	107,39	25.493.120.000,00
Pendapatan Lainnya	4.1.1.3.2	24.986.400.000,00	26.833.520.000,00	107,39	25.493.120.000,00
BELANJA	4.1.2	875.134.292.697,00	802.732.245.423,59	91,73	784.816.322.336,49
BELANJA OPERASI	4.1.2.1	719.413.914.555,00	664.419.852.000,00	92,36	671.744.260.962,59
Belanja Pegawai	4.1.2.1.1	394.191.507.866,00	381.178.466.982,00	96,70	417.897.108.146,00
Belanja Barang	4.1.2.1.2	312.493.306.689,00	274.401.782.518,00	87,81	232.434.200.669,00
Belanja Hibah	4.1.2.1.3	3.736.000.000,00	2.632.858.000,00	70,49	17.453.352.147,59
Belanja Bantuan Sosial	4.1.2.1.4	8.994.100.000,00	6.206.744.500,00	69,01	3.959.600.000,00
BELANJA MODAL	4.1.2.2	154.220.378.142,00	137.812.393.423,59	89,36	113.072.061.373,90
Belanja Tanah	4.1.2.2.1	5.080.200.000,00	1.195.323.350,00	23,53	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	4.1.2.2.2	29.061.011.248,00	25.141.235.160,00	86,51	24.295.728.893,90
Belanja Gedung dan	4.1.2.2.3	55.890.638.167,00	53.166.469.864,59	95,13	37.723.131.699,00

Uraian	Reff CaLK	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Realisasi 2018 (Rp)
1	2	3	4	5	6
Bangunan					
Belanja Jalan, Inggasi dan Jaringan	4.1.2.2.4	58.839.704.501,00	53.534.424.449,00	90,98	44.683.222.824,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	4.1.2.2.5	5.348.824.226,00	4.774.940.600,00	89,27	6.369.977.957,00
BELANJA TAK TERDUGA	4.1.2.3	1.500.000.000,00	500.000.000,00	33,33	0,00
Belanja Tak Terduga		1.500.000.000,00	500.000.000,00	33,33	0,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	4.1.2.4	43.578.774.788,00	43.496.291.852,00	99,81	38.845.082.195,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	4.1.2.4.1	42.678.754.000,00	42.678.754.000,00	100,00	36.014.556.000,00
Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik	4.1.2.4.2	900.020.788,00	817.537.852,00	90,84	830.526.195,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		918.713.067.485,00	846.228.537.275,59	92,13	821.661.404.531,49
SURPLUS/DEFISIT		765.427.010,00	39.223.549.774,55	5.124,40	(12.975.063.663,76)
PEMBIAYAAN	4.1.3				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4.1.3.1	9.962.329.430,00	9.962.329.430,25	100,00	24.510.929.434,01
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan (SILPA)	4.1.3.1.1	9.962.329.430,00	9.962.329.430,25	100,00	24.510.929.434,01
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.1.3.2	10.727.756.440,00	10.219.809.617,00	95,27	1.573.536.340,00
Penyerahan Modal Pemerintah Daerah	4.1.3.2.1	10.434.816.117,00	10.134.816.117,00	97,13	1.572.716.340,00
Pembayaran Pokok Utang	4.1.3.2.2	292.940.323,00	84.993.500,00	29,01	820.000,00
PEMBIAYAAN NETTO		(765.427.010,00)	(253.480.186,75)	33,64	22.937.393.094,01
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		0,00	38.966.069.587,80	0,00	9.962.329.430,25

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

 IRSAN EFENDI NASUTION

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus I : Jl. Kualanaram No. 1 Medan Estate Telp (061) 7366878, 7366148, 7366146, 7366781, Fax (061) 7366998
 Kampus II : Jl. Sei Siregar No. 79A/Jl. Setia Budi No. 79B Medan Telp (061) 8225602, 8201999, Fax (061) 8226331
 Email : info@medanarea.puuma.ac.id Website: uma.ac.id / ekonomi.uma.ac.id Email Fakultas: fakultas@ekonomi.puuma.ac.id

Nomor : 1518/FEB.2/01.1/XI/2020
 Lamp. :
 Perihal : Izin Research / Survey

13 November 2020

Kepada, Yth
 Kantor Kesbangpol Daerah Kota Padang Sidempuan

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara kepada mahasiswa kami :

Nama : ANDRYNY LESTARI SIREGAR
 N P M : 178330144
 Program Studi : AKUNTANSI
 Judul : Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah

Untuk diberi izin Research / Survey di Instansi yang Saudara pimpin selama satu bulan. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu

Dapat kami beritahu Research / Survey ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bid. Akademik

 Teddi Priyadi, SE, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala LPPM
3. Mahasiswa ybs
4. Pertinggal

Lampiran 3 Surat Balasan Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
 JL. JEND. BESAR ABDUL HARIS NASUTION TELEPON (0634) 7366414 PAL IV PIJOR KOLING
PADANGSIDIMPUAN

IZIN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR: 071/1899/KKBP/2020
TENTANG
IZIN PRA RISET

Dasar

- a. Undang-undang Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- d. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor: 14/PW/2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Padangsidimpuan;
- e. Surat dari Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor: 900/1353//2020 tanggal 10 November 2020 perihal Pemberian Izin Pra Riset;
- f. Surat dari Wakil Dekan Universitas Medan Area Nomor: 1538/FEB 2/01./XI/2020 tanggal 13 November 2020 perihal mohon izin Pra Riset An. ANDRYNY LESTARI SIREGAR

MEMBERI IZIN KEPADA:

NAMA : ANDRYNY LESTARI SIREGAR
NIM : 178330144
ALAMAT : JL. PUD. GG. FAMILY NO. 5 KELURAHAN SADABUAN
 KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
JUDUL PRA RISET : "ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA
 KEUANGAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN"
LOKASI PRA RISET : WILAYAH KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA
 PADANGSIDIMPUAN
LAMA PRA RISET : Tanggal 18 November 2020 s/d 31 Desember 2021
ANGGOTA PRA RISET : 1 Satu (Orang)
PENANGGUNG JAWAB : Teddi Pribadi, SE, M.Si

Setelah selesai melaksanakan kegiatan Pra Riset dimaksud yang bersangkutan **berkewajiban** memberikan 1 (satu) set laporan hasil Pra Riset kepada Walikota Padangsidimpuan Up Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Padangsidimpuan.
 Demikian Pra Riset ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
 Ditetapkan di : Padangsidimpuan
 Pada tanggal : 17 November 2020
 An. **WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN**
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN



ALFIAN, S.Sos, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19690625 199803 1 007

Tembusan:

1. Bapak Walikota Padangsidimpuan (sebagai laporan)
2. Bapak Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidimpuan
3. Sdra/i. Teddi Pribadi, SE, M.Si (Penanggung jawab)
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran 4 Surat Telah Selesai Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
BADAN KEUANGAN DAERAH
 Jln. Jen. Dr. Abd. Haris Nasution Pal – IV Pijorkoling Telp. (0634) 27075 Fax. (0634) 27075
 Kec. Padangsidempuan Tenggara

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070 /IB / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	: SULAIMAN LUBIS, S.E
NIP	: 19690501 199303 1 004
Pangkat / Golongan	: Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan	: Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidempuan

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama	: ANDRYNY LESTARI SIREGAR
NIM / NPM	: 178330144
Program Studi	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Universitas	: Medan Area
Judul Penelitian	: "Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kota Padangsidempuan"

Benar telah melakukan Pra Riset pada Tanggal 18 November s/d 31 Desember 2020 di Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidempuan sesuai izin Walikota Padangsidempuan No. 071/1899/KKBP/2020, sebagai bahan untuk menyusun laporan akhir dan syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi.

Demikian surat keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padangsidempuan, 05 Januari 2021
 KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
 KOTA PADANGSIDIMPUAN,

 SULAIMAN LUBIS, S.E
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19690501 199303 1 004